



**BUPATI TANAH LAUT**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 51 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMBUATAN PERATURAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembuatan Peraturan Daerah, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Pembuatan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tanggal 09 Nopember 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN DAERAH.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Program Legislasi Daerah yang disebut prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

**BAB II**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PEMBUATAN PERATURAN DAERAH**

**Pasal 2**

Kepala Bagian Hukum memerintahkan Kasubbag Perundang-undangan dan Produk Hukum untuk menelaah draft rancangan peraturan daerah usulan SKPD.

**Pasal 3**

Kasubbag Perundang-undangan dan Produk Hukum melakukan penelaahan dan harmonisasi perundang-undangan terhadap draft rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1).

**Pasal 4**

Bagian Hukum melakukan rapat koordinasi pembahasan raperda tingkat eksekutif dengan SKPD untuk membahas Konsep Raperda dalam rangka pemantapan dan penyempurnaan Raperda.

**Pasal 5**

Bupati menyampaikan Draft Raperda yang telah disempurnakan ke DPRD untuk dibahas.

**Pasal 6**

(1) Kasubbag Perundang-undangan dan Produk Hukum melakukan perbaikan atas hasil Pembahasan DPRD.

(2) Kasubbag Perundang-undangan dan Produk Hukum menyampaikan raperda yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk dilakukan proses Evaluasi ke Kementerian Keuangan melalui Gubernur serta raperda tentang APBD dan Tata Ruang untuk dilakukan proses evaluasi kepada Gubernur.

(3) Kasubbag Perundang-undangan dan Produk Hukum memperbaiki sesuai hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan dan Gubernur.

#### **Pasal 7**

(1) Bagian Hukum menerima dan menghimpun usulan SKPD atas rancangan Peraturan Daerah.

(2) Bagian Hukum menyusun usulan Raperda dari SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ke dalam daftar usulan Program Legislasi Daerah (Prolegda).

#### **Pasal 8**

Bupati menyampaikan surat penyampaian daftar usulan Raperda untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) kepada Pimpinan DPRD.

#### **Pasal 9**

Pengadministrasi mencetak naskah Peraturan Daerah.

#### **Pasal 10**

Bupati menetapkan dan mengundang Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 11**

Pengadministrasi mencatat dalam Register Perda dan Register Berita Daerah.

#### **Pasal 12**

Format Standar Operasional Prosedur Pembuatan Peraturan Daerah sebagaimana Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### **BAB III**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap pejabat dan pelaksana Standar Operasional Prosedur Pembuatan Peraturan Daerah, wajib menguasai, memahami dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam Pembuatan Peraturan Daerah.
- (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Pembuatan Peraturan Daerah, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pembuatan Peraturan Daerah, wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pembuatan Peraturan Daerah, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 10 Juni 2014

**BUPATI TANAH LAUT,**

Cap ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 10 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH,**

Cap ttd

**H. ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014 NOMOR 225

